

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA (STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP MINAHASA UTARA)

*Romi Bogar*¹
*Ronny Gosal*²
*Gustaf Undap*³

Abstrak

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008). Sampah juga dapat didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008). Masalah persampahan di Kabupaten Minahasa Utara pada saat ini sangat mengawatirkan, sehingga perlu penanganan serius berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Sampah yang representatif dan memadai. Gundukan sampah dalam jumlah besar maupun serakan sampah di pinggir jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan kabupaten. Semakin berkembangnya suatu daerah maka dituntut sistem manajemen yang lebih baik pula. Untuk mencapai hal tersebut yang semaksimal mungkin guna menjamin tercapainya suatu tujuan. Dinas lingkungan hidup minahasa utara adalah dinas yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah, dalam melaksanakan tugas tersebut maka di tuntut untuk menjalankan manajemen pemerintahan yang baik. Jika manajemen pemerintahan diterapkan dengan baik melalui penempatan orang-orang yang benar dan melaksanakan tugas melalui pembagian tugas, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab serta menetapkan pula kedudukan masing-masing antara suatu dengan yang lain melalui kerja sama maka akan berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata kunci: Manajemen, Sampah, Manajemen Pengelolaan Sampah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008). Masalah persampahan di Kabupaten Minahasa Utara pada saat ini sangat mengawatirkan, sehingga perlu penanganan serius berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Sampah yang representatif dan memadai. Gundukan sampah dalam jumlah besar maupun serakan sampah di pinggir jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan kabupaten. Masalah sampah di Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, dan Kecamatan Likupang Selatan juga menjadi masalah tersendiri. Warga Likupang dan Wori terus mendesak pemerintah untuk membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Likupang dikarenakan tidak adanya TPA sampah yang melayani daerah tersebut sehingga limbah sampah milik warga sejauh ini hanya ditimbun, dibakar atau dibuang ke laut sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan di daerah tersebut (manadopost.line 11 des s2018). Setelah pemerintah menetapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) di kabupaten minahasa utara yang lokasinya berada di kecamatan likupang timur desa pulisan, setelah peneliti melakukan observasi langsung peneliti melihat secara kasat mata bahwa di sekitaran objek wisata pantai pulisan yang ada di kawasan ekonomi khusus terlihat serakan sampah plastik makanan dan minuman.

Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan program yang di inisiasi oleh pemerintah untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek ruang atau wilayah dan lingkungan hidup. Titik tekannya terletak pada pemberian prioritas berupa pemberian khusus pada kawasan tertentu untuk menjadi pusat pertumbuhan. Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan salah satu strategi indonesia dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menurut undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus (KEK), Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan tertentu dimana diberlakukan ketentuan khusus di berbagai bidang dan salah satunya bidang ketenagakerjaan. Maksud dalam pengembangan KEK adalah untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung industri ekspor-impor serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi

Denngan Total jumlah penduduk saat ini 250.478 jiwa dan kepadatan 108.23 jiwa, serta pada tahun 2030, penduduk Kabupaten Minahasa Utara diprediksikan akan berjumlah 284.904 jiwa dan jumlah produksi sampah di Kabupaten Minahasa utara diprediksikan menjadi 750,664 m3 per hari dengan asumsi 2,5 m3 sampah per orang per hari dan tingkat kapasitas penduduk yang terlayani adalah sebesar 80% (Masterplan Persampahan Kabupaten Minahasa Utara, 2014). Hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sampah untuk jangka panjang.

Pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara berbanding terbalik dengan beberapa kecamatan yang berdekatan dengan pusat ibu kota,

misalnya saja kecamatan airmadidi, kecamatan kalawat, kecamatan kema, kecamatan dimembe dan kecamatan kauditan pengelolaannya sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan sampah di 5 kecamatan tersebut sudah berjalan maksimal, dan sudah tertata, masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Pengangkutan sampah sudah melakukan Roda 4 dan roda 3 sehingga pengelolaan sampah di 5 kecamatan tersebut sudah berjalan dengan baik. Yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara adalah terletak pada 3 kecamatan, yaitu kecamatan likupang selatan, likupang barat dan likupang timur. Pengelolaan sampah di 3 kecamatan tidak berjalan dengan baik, misalnya tidak ada pengangkutan roda 4 dan roda 3 serta juga masyarakat tidak di atur oleh pihak yang berwajib dalam hal ini pemerintah kecamatan dan dinas lingkungan hidup minahasa utara sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk melarang atau mengatur warga yang membuang sampah sembarang. Dari hasil observasi peneliti menemukan ada penumpukan sampah di beberapa tempat di ruas jalan menuju obsek wisata pantai pall dan pantai pulisan di kecamatan likupang timur. Sehingga ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah kabupaten minahasa utara dalam memperhatikan pengelolaan sampah sehingga tidak ada diskriminasi pengelolaan antara kecamatan yang berdekatan dengan pusat ibu kota dan kecamatan yang letaknya jauh dengan pusat ibu kota.

Di butuhkan peran maksimal juga merata oleh dinas terkait yaitu dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa utara dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu sehubungan dengan uraian di

atas di butuhkan sistem manajemen untuk menjalankan setiap permasalahan yang ada. Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Semakin berkembangnya suatu daerah maka dituntut sistem manajemen yang lebih baik pula. Untuk mencapai hal tersebut yang semaksimal mungkin guna menjamin tercapainya suatu tujuan. Dinas lingkungan hidup minahasa utara adalah dinas yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah, dalam melaksanakan tugas tersebut maka di tuntut untuk menjalankan manajemen pemerintahan yang baik. Jika manajemen pemerintahan diterapkan dengan baik melalui penempatan orang-orang yang benar dan melaksakan tugas melalui pembagian tugas, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab serta menetapkan pula kedudukan masing-masing antara suatu dengan yang lain melalui kerja sama maka akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Tinjauan Pustaka

Peran merupakan aspek yang dinamis dan kedudukan apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. jadi tepatnya bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2009:243)

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang di harapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi peranan di peroleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggungjawab atau suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2003:30). Istilah manajemen pemerintahan dipakai sebagai terjemahan dari “management of government”. Dalam pengertian yang tidak jauh berbeda disebut juga sebagai :management in government”. Dimana lebih mengfokuskan pada teori, fungsi, dan konsep manajemen di bidang pemerintahan. Istilah lain yang sering digunakan adalah “publik sector management” yang berbicara tentang manajemen disektor publik, sektor negara atau sektor pemerintahan. Pengertian tentang manajemen pemerintahan dapat di ranut dari arti kata “manajemen” yang berarti mengatur dan pengertian “pemerintahan” yang di artikan sebaagai badan atau lembaga pemenang kekuasaan. Yang kemudian dapat di artikan sebagai pengaturan yang di lakukuan oleh badan atau lembaga pemenang kekuasaan
Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai

kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Pengertian manajemen pemerintahan dapat di lihat dari dua sisi yakni proses dan hasil: Dari prosesnya pengertian manajemen pemerintahan harus lebih mengutamakan proses yang demokratis, yang berlandaskan pada rencana dan tujuan yang telah di tetapkan. Dari hasilnya maka manajemen pemerintahan akan menggambarkan kesungguhan hati, pemakaian sumber daya yang terbatas, secara hati-hati serta mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada, maka manajemen pemerintahan yang baik dapat tercermin dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. (LYNN,1995:11).

Gagasan tentang cara-cara yang baik dan benar dalam mengelola sebuah dengan manajemen pemerintahan. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi banyak ilmu-ilmu sosial lain yang mencoba melepaskan dari untuk menjadi sebuah ilmu yang dapat dikaji sendiri. hal ini terjadi pula ketika seseorang menginginkan pengetahuan tentang manajemen dalam pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini manajemen pemerintahan diberikan predikat sebagai ilmu. Layaknya ilmu-ilmu yang lain bahwa manajemen pemerintahan merupakan suatu pengetahuan. Sampah merupakan bahan sisa baik bahan-bahan yang tidak

digunakan maupun barang yang sudah diambil bagian utamanya dari aspek sosial ekonomi, sampah merupakan barang yang sudah tidak ada harganya, dari aspek lingkungan sampah merupakan barang buangan yang sudah tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan kelestarian lingkungan.

Istilah pengelolaan sampah ini biasanya berhubungan dengan semua jenis sampah, baik yang dihasilkan selama ekstraksi bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk antara dan produk akhir, konsumsi produktif akhir, atau aktivitas rumah tangga, termasuk sampah kota (perumahan, perkantoran, komersial), pertanian, dan sampah khusus (perawatan kesehatan, limbah bahan berbahaya, limbah lumpur). Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk mengurangi efek sampah terhadap kesehatan, lingkungan dan atau estetika lingkungan.

Banyak sekali pengertian mengenai sampah atau limbah padat. Sampah merupakan produk samping dari aktivitas manusia sehari-hari, dan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin banyak. "Sampah adalah semua buangan yang timbul akibat aktivitas manusia dan hewan yang biasanya berbentuk padat yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi (tchobanoglous, 1993 dalam Anonimous, 2010:22). setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan metode yang berwawasan lingkungan tersebut adalah 3R, Yaitu:

1) Reduce (mengurangi sampah) dalam arti tidak memberikan tumpukan sampah yang berlebihan

2) Rause (Menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan)

3) Recycle (Mendaur Ulang)

Metode Pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyaknya yang seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area mana metode tersebut secara umum berupa:

1) Solid waste generated: penentuan timbulan sampah

2) On site handling: penanganan di tempat atau pada sumbernya

Tahap ini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Pengumpulan (Collecting)

2. Pengangkutan (Transfer and transport)

3 Pengolahan (Treatmen) seperti pengubahan bentuk, pembakaran, pembuatan kompos dan energy Recovery (sampah sebagai penghasil energy)

4. Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Moleong (2007:6) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi dilapangan, maka variabel tugggal yang akan diteliti atau dikaji dalam

penelitian ini adalah manajemen pemerintahan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara yang diukur melalui tiga indikator yaitu:

- a) Perencanaan: Maksudnya adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana proses perencanaan pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara.
- b) Pelaksanaan: Maksudnya adalah peneliti ingin mengetahui siapa saja dan bagaimana aktor atau pelaku pemerintahan yang menjalankan proses pelaksanaan pengelolaan sampah
- c) Pengawasan: Maksudnya adalah peneliti ingin memastikan proses dan pelaksanaan dalam pengelolaan sampah apakah sudah berjalan dengan baik. Adapun informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan apa dibutuhkan oleh peneliti. Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka ke-6 informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara 1 orang
 - b) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara 1 orang
 - c) Kepala Bidang Persampahan 1 orang
 - d) Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Utara 1 orang
 - e) Masyarakat di 3 kecamatan likupang barat, selatan dan timur 3 orang

Hasil Penelitian

*Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Berdasarkan Hasil Penelitian Maka Pembahasan Dalam Penelitian Ini Akan di Analisis Berdasarkan Pada Tiga Aspek Fokus Penelitian Sebagai Berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Sampah
Dalam buku istianto manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik megatakan: melakukan penyusunan dan menentukan tujuan serta strategi pengelolaan sampah, penetapan sarana sumber daya dan pengalokasian lahan, serta penyusunan prosedur dalam pengelolaan sampah adalah bagian dari proses perencanaan pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara.
Berhubungan dengan suatu studi yang di lakukan peneliti di dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa utara, maka dalam hal ini peneliti akan membahas proses perencanaan manajemen pemerintahan dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa utara sebagai variable dalam menganalisis pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara sebagai berikut:
Tujuan pengelolaan sampah di karenakan proses pembangunan di kabupaten minahasa utara semakin pesat, seiring dengan perkembangan waktu, kemajuan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan penanganan masalah sampah di kabupaten minahasa utara, lebih khusus di kecamatan likupang selatan, likupang barat, dan likupang timur masi mengalami banyak kendala. Selain dikarenakan sarana dan prasarana juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah dengan paradigma lama, yaitu hanya membuang sembarangan dalam arti ketika ada lahan kosong masyarakat langsung membuang dan biasanya di ruas jalan, serta kurangnya kemauan

masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkan dalam kegiatan rumah tangga sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya volume sampah yang ada di kabupaten minahasa utara, khususnya di kecamatan likupang selatan, likupang barat dan likupang timur. Dari hasil wawancara menunjukkan hal ini tidak semata-mata kesalahan yang timbul dari masyarakat melainkan timbul karena manajemen pemerintahan kabupaten minahasa utara dalam hal ini dinas lingkungan hidup yang tidak bisa mengcover pengelolaan sampah. Kondisi sarana dan prasarana mulai dari armada roda empat, roda tiga juga bank-bank atau TPS sampah tidak tersedia di semua kecamatan kabupaten minahasa utara mengakibatkan proses perencanaan pengelolaan sampah tidak terlaksana dengan baik.

Di tambah lagi tidak adanya prosedur atau aturan yang di berlakukan kepada masyarakat, seperti perda kabupaten kota membuat tata pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara hanya berdasarkan kebijakan strategi daerah yang di dalamnya tidak mengatur tentang pembuangan sampah sembarangan, tidak mengatur tentang aturan khusus seperti pemungutan retribusi, melainkan hanya mengatur tentang teknis operasional pengelolaan sampah mulai dari tahap pengumpulan, pengangkutan dan terakhir pemrosesan akhir di TPA.

Dari hasil wawancara di lapangan dan berdasarkan keadaan realitas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori yang di kemukaan oleh Istianto tentang fungsi-fungsi manajemen pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Seharusnya dalam konteks perencanaan dalam pengelolaan sampah, dinas lingkungan hidup melakukan tahap-tahap

penyusunan sarana dan prasarana, seperti armada atau kendaraan rodah empat, bank-bank sampah, TPS sebagai unsur pendukung dalam mengatasi masalah persampahan di kabupaten minahasa utara khususnya di kecamatan likupang selatan, likupang barat dan likupang timur. Dengan di dukung dengan sarana dan prasarana maka proses pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah
Menentukan siapa lembaga yang melakukan tugas sebagai pelaksana serta menentukan hal apa saja yang akan di lakukan oleh pelaku tersebut adalah bagian dari proses pelaksanaan pengelolaan sampah. Di kabupaten minahasa utara yang menjadi pelaksana dalam pengelolaan sampah adalah dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa utara. Selain dari instansi pemerintah peneliti akan membahas siapa saja aktor atau pelaku dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara sebagai berikut.

Dalam pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara sebagai pelaksana tugas hanya mengandalkan bidang persampahan dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa utara tidak membentuk tim khusus sebagai pelaksana tugas di bidang persampahan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang persampahan yang termuat pada poin ke empat, lima dan enam yaitu pengawasan pembinaan dan pengupayaan pemulihan lingkungan, dan pengelolaan sampah rumah tangga, pengkoordinasian penetapan metode pengawasan pemulihan lingkungan dan metode penanganan sampah rumah tangga juga pengkoordinasian perumusan tata cara pemulihan

lingkungan kebersihan dan penanganan sampah membuat pengelolaan sampah sebagai petunjuk teknis saja. Sedangkan untuk melakukan eksekusi masalah persampahan hanya mengandalkan petugas kebersihan jalan dan pengangkutan sampah oleh armada-armada untuk di bawah ke TPA. Masalah pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara tidak hanya datang dari petunjuk teknis melainkan juga datang dari ketidak mampuan dinas lingkungan hidup minahasa utara dalam menjangkau seluruh kecamatan di kabupaten minahasa utara. Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan fenomena realitas pengelolaan sampah di lapangan tidak semua tempat atau wilayah di jangkau oleh dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa utara. Dalam pembahasan ini peneliti memfokuskan pelaksanaan pengelolaan sampah di kecamatan likupang selatan, likupang barat dan likupang timur. Dari hasil wawancara peneliti bahwa di kecamatan tersebut tidak ada aktor atau pelaku yang turun langsung menangani permasalahan sampah, selain dari pada itu tidak ada tim khusus yang menangani pengelolaan sampah di kecamatan tersebut. Pihak dinas lingkungan hidup hanya sebagai melakukan himbuan kepada pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat, berupa sosialisasi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menekankan untuk bisa masyarakat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, misalnya penimbunan sampah dan mengolah sampah menjadi pupuk. Di tambah lagi ketidak sadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah justru hanya membuat peningkatan volume sampah di kecamatan likupang selatan, likupang barat dan likupang timur semakin tinggi. Dari hasil

wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara sebagai pelaku dalam pelaksana tugas pengelolaan sampah tidak ada. Pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara hanya mengandalkan petunjuk teknis bidang persampahan saja.

3. Pengawasan Pengelolaan Sampah Untuk bisa mengevaluasi program dan kinerja yang sudah di dilaksanakan adalah menerapkan fungsi pengawasan. Pada pembahasan ini peneliti akan berfokus pada pengawasan yang di lakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara sebagai berikut. Dari hasil wawancara peneliti di lapangan menunjukkan fakta bahwa dalam proses pengawasan kegiatan pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup membentuk tim personil pengawasan lapangan terkait dengan masalah sampah yang ada di suatu wilayah. Akan tetapi fungsi dari pada di bentuk personil pengawasan adalah mereka hanya melakukan tugas ketika di lapangan terlihat ada tumpukan sampah, mereka baru bisa menghubungi dinas lingkungan hidup untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan fungsi pengawasan yang di maksud dalam studi kepustakaan adalah melakukan fungsi pengawasan yang luas dan mendalam, justru berbanding terbalik dengan keadaan hasil wawancara peneliti di lapangan. Dinas lingkungan hidup hanya membentuk tim personil penanganan masalah sampah di lapangan ketika terjadi masalah sampah, seperti tumpukan sampah, dan masyarakat membuang sampah sembarangan, baru tim tersebut melakukan fungsi pengawasan yaitu sistem laporan

kepada dinas lingkungan hidup. Sedangkan dalam pengelolaan sampah seperti misalnya kegiatan pembersihan jalan, pengangkutan sampah oleh petugas armada tidak dilakukan pengawasan sebagaimana fungsi pengawasan yang luas dan mendalam. Di tambah lagi tim personil pengawas lapangan hanya melakukan tugas di kecamatan yang sudah bisa di cover oleh dinas lingkungan hidup yaitu kecamatan airmadidi, kecamatan kalawat, kecamatan kema, dan kecamatan dimembe. Sedangkan di beberapa kecamatan seperti pada fokus pembahasan penelitian ini adalah kecamatan likupang selatan, likupang barat dan likupang timur, tim personil pengawasan tersebut tidak bisa menjangkau. Tidak hanya dari masalah perencanaan, pelaksanaan akan tetapi masalah juga datang dari sistem pengawasan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara. Dari hasil wawancara peneliti di lapangan mengatakan bahwa hal tersebut di sebabkan oleh terbatasnya anggaran. Dinas lingkungan hidup membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat kabupaten minahasa utara memiliki 10 kecamatan, jelas cakupan pengelolaan sampahnya cukup banyak.

Untuk itu dari hasil pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana Teori istianto mengatakan Fungsi pengawasan dan pengendalian yang di laksanakan oleh manajemen pemerintahan justru akan semakin mendalam dan luas, seiring dengan membesarnya desentralisasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk

privastisasi. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat akan terjadi suasana tanpa kendali, artinya dinas lingkungan hidup harus melakukan pengawasan pengelolaan sampah dengan luas mencakup semua kecamatan dan melakukan pengawasan dengan baik, Namun justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan para informan serta pengumpulan data primer dan sekunder, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara oleh dinas lingkungan hidup hanya di lakukan berdasarkan kebijakan strategi daerah. Dinas lingkungan hidup hanya melakukan pengelolaan sampah berupa kumpul, angkut dan pemrosesan akhir, dalam arti pengelolaannya lebih tepatnya di lakukan oleh dinas kebersihan, sedangkan untuk mengelola sampah seperti produk daur ulang tidak ada.
2. Pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara masi berjalan kurang baik. Kendalanya adalah tidak semua kecamatan bisa di cover oleh dinas lingkungan hidup, seperti kecamatan likupang selatan, likupang barat, dan likupang barat.
3. Sistem pengawasan pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara oleh dinas lingkungan hidup tidak ada. Dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan ketika terjadi masalah sampah berserakan atau menumpuk baru di lakukan, dalam artian ini bukan sistem pengawasan melainkan sistem laporan kebersihan di tambah lagi Sarana dan Prasarana

dinas lingkungan hidup sangat terbatas, mulai dari anggaran, roda 4 dan roda 3, bank-bank sampah, TPS hal ini semakin tidak menunjang dalam pengawasan pengelolaan sampah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen pemerintahan dalam pengelolaan sampah di kabupaten minahasa utara dengan suatu studi dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa utara maka peneliti akan memberikan saran-saran mengenai hasil penelitian kepada dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa utara agar supaya kedepan menjadi lebih baik. Sebabai berikut:

1. Dinas lingkungan hidup mampu bekerja sama dengan masyarakat dengan mengajak seluruh lapisan
- Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. 2017, Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.HUM. 2014, Hukum Lingkungan : prespektif global dan nasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Drs. Sumadi Suryabrata, B.A., Ed.s., Ph.D. 2016, Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. 2016, Manajemen; dasar, pengertian, Dan Masalah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M.Quadrat Nugraha, 2012, Manajemen Strategis Pemerintahan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018.
- Nurman, M.Si., Ph.D 2015, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Hakim, M., Wijaya, J., Sudirja, R. Mencari Solusi Penanganan Masalah sampah

masyarakat agar mau bersama-sama mengelolah sampah menjadi nilai yang berdaya guna untuk menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan dan TPA.

2. Dinas lingkungan hidup memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan untuk menghindarkan sampah-sampah liar yang ada di sekitar kabupaten minahasa utara.
3. Perlu ada penambahan personil pengangkut sampah baik di mobil sampah maupun di tempat pembuangan akhir. Juga membentuk tim pengawasan lapangan yang mencakup semua kecamatan dan Perlu adanya penambahan armada roda empat dan tiga yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Kota. Bandung :Direktorat Jenderal Hortikultura, DEPTAN RI ; 2006.
- Mahmudi. 2005. "Manajemen Kinerja Sektor Publik". Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mahsun. 2005. "Metode Penelitian Bahasa". Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Sumber Lian:
- Marcell Zadke Wakkary, Paulus A. Pangemanan, Leonardus Ricky Rengkung, 2015.
- Analisis Kelayakan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Airmadidi Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Analisis Kelayakan Lokasi TPA. ASE 11: 3A: 33-44
- Jayanti Nigiana, Endang Larasati, Nina Widowati:
- Manajemen pengelolaan sampah di kecamatan tembalang. Jurnal administrasi publik universitas diponegoro

Putri Nilam sari, 2016. Analisis Pengelolaan Sampah Padat di kecamatan banuhampu kabupaten agam: Jurnal analisis pengelolan sampah. Vol 10, no 2.
Sri Wahyuni, Gustaaf Budi Tampi, Rully Mambo 2013. Kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kota manado

Viradin Yogiesti, Setiana Hariyani, Fauzul Risal Sutikno 2010. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di kota kediri. Jurnal perencanaan wilayah dan kota fakultas teknik universitas brawijaya. Vol 2, no 2

